



**REVISI PARAMETER KMS**

## Dewan Minta Kaji Ulang

JOGJA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja mengkaji ulang perubahan parameter keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial atau pemegang kartu menuju sejahtera (KMS). Wakil rakyat beralasan perubahan parameter justru dinilai mengurangi kuota pemegang KMS.

"Perubahan parameter itu penting untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, tapi pembobotannya untuk hal yang pokok kok dikurangi?" kata anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Budi Utomo, dalam rapat bersama Dinas Sosial di DPRD Kota Jogja, Selasa (27/2).

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Bejo Suwarno memaparkan perubahan parameter keluarga sasaran perlindungan sosial untuk pendataan 2019. Dari tujuh parameter yang diubah di antaranya adalah soal pendapatan dan aset.

Dalam parameter lama pendapatan keluarga miskin sebesar Rp300.000-Rp400.000, dinaikkan menjadi Rp423.815. Tagihan listrik per bulan yang awalnya kurang dari Rp50.000 menjadi Rp75.000. Namun bobot penilaiannya berkurang dari 12 poin menjadi 10 poin.

● Lebih Lengkap Halaman 14

---

**Dewan Minta...**

"Juni-Agustus mulai pendataan oleh pekerja sosial masyarakat untuk KMS 2019," kata Bejo. Namun, perubahan parameter itu juga masih akan disempurnakan kembali jika ada masukan-masukan.

Data warga penerima KMS tahun ini ditetapkan sebanyak 17.253 kepala keluarga (KK) atau 55.094 jiwa. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18.651 KK atau 60.215 jiwa pemegang KMS.

Bejo mengatakan dari data KMS, yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) penanggulangan kemiskinan di Pemerintah Pusat sebanyak 33.432 jiwa. Sehingga masih ada sekitar 21.662 jiwa dari KMS yang tidak masuk.

"Kami upayakan dengan parameter baru ini, akan menyesuaikan dengan BDT karena BDT tidak ada skor penilaian," ujar Bejo.

Dwi Budi Utomo mengapresiasi upaya revisi parameter kemiskinan. Namun ia menekankan soal pendapatan, pangan, dan pendidikan bagian dari persoalan pokok kemiskinan yang perlu diutamakan dalam penilaian KMS, sehingga pembobotannya perlu dinaikkan, bukan malah turun. "Pesan kami revisi parameter ini perlu dikaji ulang," ujar Dwi Budi.

Terkait dengan KMS yang belum masuk dalam BDT penerima bantuan Pemerintah Pusat, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar dimasukkan dalam kuota tambahan data penerima bantuan keluarga harapan (PKH) dari Dinas Sosial sebanyak 10.000 jiwa.

Sementara sisanya menjadi pekerjaan rumah yang perlu dimasukkan jika ada kuota tambahan lagi. (Ujang Hasanudin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005